

# KINERJA, PROSPEK DAN KEBIJAKAN INVESTASI DI INDONESIA

## *Performance, Prospect and Policy of Investment in Indonesia*

Prajogo U. Hadi

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

### ABSTRACT

Investment has a very important role in national economic development, including agricultural sector. In the long-run macroeconomic perspective, investment will increase capital stock, by which production capacity of the community can be increased that, in turn, accelerates national economic growth. This paper aims to list the investment problems, to know the future prospect of agricultural investment, and to formulate policy for promoting agricultural investment in Indonesia. From the findings, some policy suggestions to encourage growth of investment are as follows: (1) To create political, social and economic stability; (2) To develop good and clean government, as well as long-term policy consistency, clearness and assurance, and efficient bureaucracy; (3) To develop efficient function of financing sector and conducive labor relation systems; (4) To generate easier and simpler taxing system as well as export-import and domestic trade procedures; (5) To make land ownership or contract by private company easier, but the majority of agricultural lands are not owned and operated by foreign company; (6) To cancel all regional regulations (*Perda*) which hamper investment and business activities; and (7) To increase public investment needed as complement for private company and smallholder's investment in agricultural sector.

**Key words :** *agricultural investment, investment climate, investment policy*

### ABSTRAK

Investasi mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian. Dalam perspektif jangka panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital, dimana penambahan stok kapital akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Makalah ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan investasi, melihat prospek investasi pertanian, dan merumuskan kebijakan untuk mendorong investasi di bidang pertanian di Indonesia. Beberapa saran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan investasi adalah: (1) Menciptakan stabilitas kondisi politik, sosial dan ekonomi; (2) Membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, adanya konsistensi, kejelasan dan kepastian kebijakan pemerintah jangka panjang, serta birokrasi yang efisien; (3) Menciptakan fungsi sektor pembiayaan yang efektif dan sistem ketenagakerjaan yang kondusif; (4) Menciptakan sistem perpajakan dan prosedur perdagangan ekspor-impor dan domestik yang mudah dan sederhana; (5) Mempermudah kepemilikan atau kontrak tanah perusahaan swasta, tetapi mayoritas lahan pertanian jangan

sampai dikuasai perusahaan asing; (6) Membatalkan semua Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat kegiatan investasi dan bisnis; dan (7) Meningkatkan investasi pemerintah yang sangat diperlukan sebagai komplemen bagi investasi swasta dan rakyat di bidang pertanian.

**Kata kunci** : *investasi pertanian, iklim investasi, kebijakan investasi*

## PENDAHULUAN

Investasi adalah bagian sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian. Dalam perspektif jangka panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital, dimana penambahan stok kapital akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional (van der Eng, 2009). Pemerintah telah berupaya untuk mendorong investasi, baik oleh pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha asing, dengan berbagai kebijakan dan regulasi. Namun masih banyak faktor lingkungan selain kebijakan dan regulasi pemerintah yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan investasi di bidang pertanian, bahkan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh kementerian-kementerian lain di luar Kementerian Pertanian dan lembaga-lembaga non-kementerian. Khususnya untuk investasi asing, lebih banyak persyaratan yang dituntutnya agar mereka tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2010, pemerintah akan mengandalkan pertumbuhan investasi dan menyatakan bahwa pada tahun tersebut ada banyak faktor yang akan mendorong investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2010 akan lebih tinggi dibanding tahun 2009 dan pertumbuhan investasi diprediksi akan mencapai 14% dengan nilai sekitar US\$ 21 milyar (Ekonomi & Bisnis, 8 September 2009). Menurut Kementerian Keuangan, pangsa pengeluaran pemerintah akan menurun, sedangkan konsumsi masyarakat dan investasi akan meningkat dua kali lipat.

Sementara itu, khususnya untuk sektor pertanian, KTT Ketahanan Pangan Dunia yang diselenggarakan pada bulan November 2009 menghasilkan komitmen untuk meningkatkan investasi di sektor pertanian dan mengeliminasi masalah kelaparan lebih cepat dari yang telah ditargetkan semula. Ada dua komitmen yang berkaitan dengan investasi pertanian, yaitu: (1) Mencegah kecenderungan turunnya pendanaan domestik dan asing untuk pertanian, ketahanan pangan dan pembangunan perdesaan di negara sedang berkembang dan meningkatkan bantuan pembangunan publik secara signifikan; dan (2) Meningkatkan investasi baru untuk produksi dan produktivitas pertanian di negara sedang berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai ketahanan pangan untuk masyarakat.

Peningkatan investasi di bidang pertanian tentu saja diharapkan mempunyai dampak positif terhadap kinerja sektor pertanian, antara lain produksi pertanian, yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian. Dengan meningkatnya produksi pertanian, maka ketahanan pangan nasional menjadi makin kuat, pendapatan petani akan meningkat, kesempatan kerja perdesaan akan makin luas, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang, devisa negara makin besar dan PDB sektor pertanian juga meningkat.

Makalah ini bertujuan untuk: (1) Menginventarisasi permasalahan investasi; (2) Melihat prospek investasi pertanian; dan (3) Merumuskan kebijakan untuk mendorong investasi di bidang pertanian di Indonesia.

## PENGERTIAN DAN PERANAN INVESTASI

### Pengertian dan Cakupan Investasi

Secara konseptual, investasi (*investment*) adalah perubahan dalam input-tetap (*fixed inputs*) yang digunakan dalam proses produksi. Dalam definisi yang lebih sempit, *investment* adalah perubahan dalam stok modal fisik, yaitu input fisik yang mempunyai umur ekonomi satu tahun atau lebih. Dengan kata lain, investasi adalah pembentukan modal-tetap (*fixed capital formation*). Yang dimaksudkan dengan pembentukan modal-tetap adalah pendirian bangunan/konstruksi, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan pembelian barang modal baru dan bekas dari luar negeri (BPS, 1997). Investasi yang dilakukan setiap tahun, baik oleh perusahaan maupun pemerintah, membentuk akumulasi stok modal (*capital stock*).

Dalam pengertian umum, stok modal di suatu negara terdiri dari barang-barang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (van der Eng, 2009): (1) Masa pakai lebih dari satu tahun (*durable*); (2) Dapat diproduksi kembali (*reproducible*); (3) Kasat mata (*tangible*); dan (4) Tidak berubah (*fixed*). Stok modal-tetap mencakup bangunan, alat transportasi, mesin-mesin dan peralatan lainnya. Penggunaan aset-aset tersebut memberikan kontribusi dalam penciptaan output dan pendapatan dalam perekonomian suatu negara. Sementara itu, yang tidak termasuk ke dalam stok modal-tetap adalah: (1) Aset yang tidak dapat diproduksi kembali yaitu hutan alam, lahan dan deposit dalam tanah; (2) Aset tidak kasat mata yaitu patent, perangkat lunak dan hak cipta; (3) Aset tidak tetap yaitu inventori berupa produk akhir dan produk antara dari suatu kegiatan produksi; dan (4) Perlengkapan militer.

Di bidang pertanian, stok modal mencakup ternak, bangunan dan alat/mesin pertanian dan infrastruktur, termasuk nilai perbaikannya (van der Eng, 2009; BPS, 1997). Yang dimaksudkan dengan ternak sebagai stok modal adalah ternak yang dibeli untuk pembibitan guna menghasilkan anak (*breeding*), menghasilkan susu (*milking*), dan hewan tarik (*draft animal*), dan bukan dipotong

untuk tujuan konsumsi (BPS, 1997). Perbaikan lahan (*land improvement*) juga termasuk ke dalam stok modal (BPS, 1997).

Di Indonesia, investasi di bidang infrastruktur biasanya dilakukan oleh pemerintah, sedangkan di bidang produksi riil dilakukan oleh pelaku usaha, baik perusahaan (BUMN, swasta domestik dan swasta asing), maupun rumah tangga pertanian. World Bank (2009) memperlakukan pengeluaran untuk infrastruktur (pengairan dan jalan pertanian), subsidi input, litbang dan penyuluhan pertanian sebagai pengeluaran pemerintah (*public spending*) untuk pembangunan pertanian. Investasi oleh perusahaan asing dilakukan sendiri atau patungan (*joint venture*) dengan perusahaan domestik yang membentuk MNC (*Multi National Corporation*). Perusahaan peternakan ayam ras (pedaging dan petelur) dan perbenihan banyak dilakukan oleh perusahaan MNC. Rumah tangga petani melakukan investasi dalam bentuk pembelian indukan ternak sapi untuk pembibitan, susu dan hewan tarik, perbaikan saluran irigasi kuarter, dan alsintan (traktor, sprayer, alat perontok gabah, pemipil jagung, pengepres bahan olahan karet, alat pengering tembakau, dan lain-lain). Biaya pembukaan lahan usaha pertanian dan tanaman yang diusahakan hingga menjelang panen pertama dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan investasi, baik oleh perusahaan (BUMN dan swasta) maupun rumah tangga petani.

### **Peranan Investasi dalam Pembangunan Ekonomi**

Tingkat investasi untuk pembentukan modal bisa rendah atau tinggi. Tingkat investasi yang rendah, baik karena jumlah tabungan yang terbatas maupun akses yang terbatas terhadap sumber-sumber dana investasi luar negeri, merupakan faktor penghambat utama bagi pembangunan ekonomi. Pada tahun 1950an, tingkat tabungan yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang juga rendah merupakan faktor penghambat utama dalam pembangunan ekonomi (Abbas, 1955). Pada waktu itu, seorang ahli ekonomi pembangunan yaitu W.W. Rostow menegaskan bahwa COR (*Capital Output Ratio*) yang naik secara drastis menandai fase permulaan pembangunan ekonomi suatu negara. Kenaikan COR yang tinggi tersebut telah berhasil mengangkat negara-negara yang sekarang ini sudah maju dari stagnasi menuju fase pertumbuhan yang berkelanjutan secara mandiri (van der Eng, 2009).

Hasil penelitian belakangan menunjukkan bahwa negara-negara yang sekarang sudah maju tidak menunjukkan bukti-bukti kuat bahwa COR bergerak ke arah tertentu dari tahun ke tahun (Kuznets, 1963; Ohkawa, 1984; Le Thanh, 1988). Kuznets (1964) bersikukuh bahwa kontribusi dari peningkatan stok tenaga kerja dan modal terhadap peningkatan pendapatan per kapita dalam periode yang panjang di negara-negara maju utama hanya berkisar 15-20%. Menurut Kuznets, bagian terbesar dari pertumbuhan ekonomi negara-negara maju itu bersumber dari peningkatan ketrampilan, pendidikan, dan lain-lain dari tenaga kerja, atau sumber-sumber lain yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja per JOK (jam-orang-kerja) secara cepat yang dikombinasikan dengan modal material, dan bukan

peningkatan input per orang. Para penulis lain, misalnya Kendrick (1993) memberikan catatan bahwa perbaikan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dan pergeseran sumberdaya dari sektor kurang produktif ke sektor yang lebih produktif merupakan faktor yang lebih penting bagi pembangunan ekonomi jangka panjang dibandingkan dengan pembentukan modal.

Meskipun kontribusi pembentukan modal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tampaknya lebih terbatas dibandingkan dengan yang dibayangkan semula, pembentukan modal masih tetap diperlukan. Utamanya, perubahan teknologi dalam pengolahan hasil cenderung ditandai oleh meningkatnya penggunaan barang-barang modal karena memungkinkan peningkatan output per tenaga kerja secara berkelanjutan. Madison (1991) menekankan bahwa meskipun COR tidak naik secara sangat signifikan, perekonomian tetap mampu meningkatkan rasio PDB terhadap investasi pada barang modal selama proses pembangunan ekonomi berlangsung. Di negara-negara yang pertumbuhan ekonomi cepat pada umumnya menggunakan pangsa total pengeluaran yang lebih besar untuk pembentukan modal dibanding di negara-negara yang pertumbuhan ekonominya rendah.

Namun demikian, peranan pembentukan modal pada fase awal pembangunan tidak boleh berlebihan. Mudah dilihat bahwa dalam fase awal pembangunan, perubahan yang cepat di sektor-sektor ekonomi utama di negara-negara sedang berkembang tidak membutuhkan pembentukan modal dalam jumlah besar, misalnya di pertanian, perdagangan, kerajinan tangan dan industri kecil. Bukti-bukti historis menunjukkan bahwa banyak infrastruktur publik yang padat modal (jalan, rel kereta api, dll) dibangun selama pembangunan ekonomi berjalan, bukan sebelumnya. Berdasarkan itu, maka tingkat pembentukan modal yang lebih tinggi bukan merupakan prakondisi bagi pembangunan ekonomi, tetapi berjalan bersamaan dengan proses pembangunan itu sendiri (van der Eng, 2009).

## **KONDISI INVESTASI DI INDONESIA**

### **Metode Pengukuran Investasi**

Kebutuhan untuk mengukur pembentukan modal di Indonesia meningkat pada awal tahun 1950an, yang merupakan bagian utama dari proses perencanaan ekonomi makro pada Biro Perancang Negara (BPN<sup>1</sup>) yang mencapai puncaknya pada Repelita I (1956-1960). Bagian terbesar dalam kerja awal BPN dipusatkan pada identifikasi cara untuk memacu tingkat pembentukan modal guna mencapai tingkat investasi yang akan mendorong lepas landas kearah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (BPN, 1957; Mears, 1961). Pada saat itu data akun nasional (*national account*) Indonesia masih sangat terbatas dan hasil estimasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih sangat kasar.

---

<sup>1</sup> Sekarang bernama Bappenas (Badan Perencana Pembangunan Nasional).

BPS kemudian diberi tanggungjawab untuk mengkompilasi akun nasional (*national account*) pada tahun 1960 termasuk pembuatan angka baru PMTB, namun prosedur yang sesungguhnya digunakan lembaga itu tidak diketahui. Angka-angka PMTB yang dibangkitkan BPS untuk tahun 1958-1959 jauh di atas angka BPN pada tahun yang sama. BPS membangkitkan dan mempublikasikan angka PMTB pada harga nominal dan harga konstan sejak tahun 1958, yang mengalami beberapa revisi karena perubahan tahun-tahun dasar yang digunakan untuk menghitung seri harga konstan yaitu: 1958-1973 pada harga 1960; 1971-1983 pada harga 1973; 1983-1993 pada harga 1983; 1988-2003 pada harga 1993; dan 2000-2007 pada harga 2000 (van der Eng, 2009).

Terlepas dari tidak diketahuinya bahwa BPS telah menghitung PMTB berdasarkan metode aliran komoditas (*commodity flow method*), BPS tidak secara resmi mempublikasikan prosedur yang digunakan untuk menghitung PMTB. Karena itu tetap belum jelas alasan untuk merevisi PMTB dan perubahan metodologi yang digunakan. Metode aliran komoditas untuk menghitung PMTB umumnya digunakan dalam akun nasional dan mencakup alokasi output dan impor masing-masing individu komoditas ke konsumsi akhir, PMTB, inventori atau ekspor berdasarkan survei langsung ke perusahaan dan dokumen administratif. Selama tahun 1960an, impor bahan-bahan konstruksi, mesin-mesin dan peralatan tetap merupakan komponen penting, tetapi datanya diperkaya dengan data administratif mengenai produksi dan penggunaan bahan-bahan konstruksi serta data produksi mengenai mesin dan peralatan dari survei tahunan pada industri manufaktur dan Sensus Industri 1963 untuk mencakup produksi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Informasi yang sama mengenai prosedur belakangan untuk menghitung PMTB juga tidak ada. Tampaknya BPS menggunakan hasil Tabel Input-Output untuk tujuan tersebut, walaupun hasil pertama dengan data agregasi PMTB tidak dipublikasikan hingga 1977 (IDE, 1977).

Sebagai akibat dari penggunaan metode aliran komoditas, BPS tidak membedakan antara PMTB di sektor publik dan sektor swasta. Selain itu, PMTB oleh rumah tangga dan usaha kecil tidak dimasukkan, atau dimasukkan tetapi tidak sempurna. BPS juga mengasumsikan bahwa penyusutan adalah tetap dan rata sebesar 5% dari PDB. Berdasarkan itu, PMTB meningkat cepat dari rata-rata 7,5% sampai pertengahan 1960an menjadi rata-rata 24% pada tahun 1980an dan 27% pada tahun 1990an sampai krisis 1997/1998, dan pada tahun 2007 menjadi 25%. Jika dibandingkan dengan data Tabel I-O, PMTB terlalu rendah pada awal tahun 1970an. Mayoritas komponen PMTB adalah bangunan, mesin dan peralatan, serta alat transportasi.

## **Pembiayaan Investasi**

Akun nasional Indonesia yang dipublikasikan tidak memberikan data PMTB secara detil, tetapi secara kasar didasarkan pada persamaan di bawah ini:

$$I_t = S_t^G + X_t + S_t^{HC} + F_t$$

dimana: I = Investasi (PMTB) di dalam negeri;  $S_t^G$  = tabungan pemerintah termasuk tabungan perusahaan negara; X = pinjaman luar negeri untuk investasi swasta;  $S_t^{HC}$  = jumlah tabungan domestik oleh rumah tangga dan perusahaan; dan F = investasi neto luar negeri (investasi masuk dikurangi investasi keluar).

Dalam akun nasional tersebut, tabungan domestik adalah sumber penting keuangan dalam bentuk aset likuid seperti simpanan di bank, pembelian saham dan obligasi, atau aset relatif likuid seperti emas, permata dan koleksi lainnya, atau kurang likuid seperti tanah, ternak, barang tahan lama dan real estate. Sumber-sumber tabungan adalah rumah tangga dan usaha bisnis, pemerintah dan investasi asing neto. Selama 10 tahun terakhir (1998-2007), jumlah tabungan per tahun berdasarkan harga nominal oleh rumah tangga dan bisnis adalah 17,0 persen dari PDB nasional, sedangkan tabungan pemerintah (33% dari PMTB) adalah 7,2 persen dan investasi asing neto adalah -2,7 persen (Akun Nasional dalam van der Eng, 2009). Angka negatif pada investasi asing neto disebabkan oleh krisis tahun 1997/1998 yang menyebabkan terjadinya divestasi dan beberapa perusahaan asing menjual asetnya di Indonesia dan bahkan ada yang pindah keluar negeri. Data tersebut membuktikan bahwa tabungan dalam negeri, utamanya tabungan di bank, merupakan sumber paling penting untuk membiayai PMTB.

### **Dampak Pengeluaran Pemerintah**

Investasi merupakan faktor pembatas bagi kapasitas produksi dan produksi pertanian karena terjadi perkembangan yang mengkhawatirkan yaitu bahwa investasi publik dan swasta di bidang pertanian menurun. Turunnya investasi publik menjadi perhatian besar karena investasi publik pada infrastruktur dasar, pembentukan modal SDM dan litbang merupakan prakondisi yang diperlukan (*necessary conditions*) bagi investasi swasta (Antholt, 1994; Evenson dan McKinsey, 1991; Pray dan Evenson, 1991; Pardey *et al.*, 1992). Investasi publik juga mendorong adopsi teknologi, menstimulasi investasi komplemen pada produksi pertanian dan penggunaan input, dan yang diperlukan untuk pemasaran hasil-hasil pertanian (Nelson, 1964 dan 1981).

Pengeluaran publik pada pertanian mencakup biaya jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi pertanian dan kehutanan meliputi pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur pertanian, litbang, pendidikan dan pelatihan. Pengeluaran pemerintah untuk pertanian di berbagai negara sangat bervariasi, yaitu 0,4-9,1 persen di negara maju, 1,5-7,9 persen di Afrika, 1,7-23 persen di Amerika Latin, dan 0,20-19 persen di Asia (IMF, 1995). Pengeluaran pemerintah untuk pertanian selama 1988-1993 umumnya menurun di Afrika, Eropa Timur dan negara-negara industri serta beberapa negara Asia, meningkat di China dan meningkat/menurun di Amerika Latin.

Komposisi dan jumlah pengeluaran pemerintah juga menjadi perhatian penting. Pada awal 1978, kajian FAO mengidentifikasi kurangnya investasi pada pendidikan dan pelatihan di negara-negara sedang berkembang yang menjadi penghambat pertumbuhan pertanian (Beal, 1978). Secara absolut dan relatif, pengeluaran pada pendidikan dan pelatihan di negara-negara sedang berkembang lebih rendah dibanding di negara-negara maju. Selanjutnya disarankan agar pengeluaran pada pendidikan pertanian di negara sedang berkembang paling sedikit adalah 4,6 persen dari PDB dan setiap orang tenaga penyuluh menangani paling sedikit 1.000 keluarga petani.

Kebijakan publik dan alokasi anggaran untuk infrastruktur juga mempunyai efek dampak besar pada produksi pertanian. Infrastruktur fisik dan kelembagaan mempengaruhi pembangunan dan transfer teknologi. Sebagai contoh, sistem irigasi dan jalan diperlukan agar teknologi dapat dipraktekkan dan menguntungkan. Untuk itu, reformasi pada kebijakan harga atau sistem pemasaran juga dibutuhkan sebagai insentif bagi adopsi teknologi.

Pertentangan serious muncul pada reformasi penyesuaian struktural (*structural adjustment reforms*). Pengurangan anggaran pada layanan publik seringkali mengikuti reformasi pasar. Kebijakan fiskal diperlukan untuk stabilitas ekonomi jangka pendek, sedangkan penurunan dalam pengembangan SDM, litbang, dan infrastruktur mempunyai dampak detrimental pada pertumbuhan produktivitas jangka panjang. Karena itu, pembuat kebijakan perlu membuat pilihan secara hati-hati untuk mengurangi dampak negatif dari pengurangan anggaran pada pertumbuhan kedepan.

Dengan menggunakan pendekatan ekonometrik, Jayne *et al.* (1994) menunjukkan komplementaritas kebijakan publik dan investasi publik dalam memfasilitasi penggunaan teknologi. Analisis tersebut menyimpulkan bahwa terjadinya penurunan tajam dalam investasi publik dan pertumbuhan di Zimbabwe selama ada komplementaritas kebijakan publik terhadap investasi pada teknologi irigasi dan penggunaan input variabel privat.

Hasil analisis di Indonesia dan negara-negara lain yang pertumbuhan ekonominya cepat yaitu Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand, Botswana dan Mauritius menunjukkan adanya hubungan positif yang erat antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan PDB per kapita selama 1970-2006 (World Bank, 2008). Selanjutnya, hasil penelitian FAO di 20 negara di Amerika Latin memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah di perdesaan mempunyai dampak positif pada pertumbuhan pertanian (Alcott *et al.*, 2006). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah komposisi pengeluaran ikut berpengaruh, dimana pangsa pengeluaran yang besar untuk subsidi pada input privat mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan pertanian. Fuglie (2004) mengidentifikasi bahwa stagnasi pertumbuhan pertanian di Indonesia sejak awal dekade 1990an disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi swasta dan investasi pemerintah. Investasi pemerintah pada litbang, infrastruktur perdesaan dan irigasi



sangat penting sebagai komplemen bagi investasi swasta di bidang pertanian. Namun hasil analisis World Bank (2009) dengan menggunakan persamaan ekonometrik tunggal mendapatkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap laju pertumbuhan PDB pertanian per kapita. Dalam analisis tersebut, investasi pemerintah mencakup pengeluaran untuk infrastruktur fisik pertanian (irigasi dan jalan pertanian), subsidi input, litbang, dan penyuluhan pertanian.

## **Permasalahan Investasi**

Menurut WEF (2005), cukup banyak faktor penghambat bisnis di berbagai negara, yaitu sebagai berikut (diurutkan dari yang paling buruk): (1) Birokrasi yang tidak efisien; (2) Infrastruktur yang buruk; (3) Regulasi perpajakan yang kurang kondusif; (4) Korupsi pejabat; (5) Kualitas SDM yang buruk; (6) Kebijakan yang tidak stabil; (7) Regulasi ketenagakerjaan yang restriktif; (8) Tarif pajak yang terlalu tinggi; (9) Akses ke pasar keuangan yang rendah; (10) Regulasi valuta asing yang kurang mendukung; (11) Kriminalitas; (12) Pemerintah yang tidak stabil (misalnya kudeta); (13) Etika kerja yang buruk dari para pekerja; dan (14) Inflasi yang terlalu tinggi.

Di Indonesia, kondisi iklim investasi mempengaruhi kegiatan investasi. Menurut Tambunan (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi iklim investasi adalah: (1) Stabilitas politik, sosial dan ekonomi; (2) Kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan); (3) Efektifitas fungsi sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk sistem perburuhan); (4) Regulasi dan perpajakan; (5) Birokrasi (menyangkut waktu dan biaya); (6) Masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung dan tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto jangka panjang dari kegiatan investasi; dan (7) Hak milik mulai dari tanah sampai dengan kontrak. Menurut World Bank (2005), empat faktor di antaranya yang paling berpengaruh adalah stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi dan kepastian kebijakan ekonomi. WEF (2005) mengkonfirmasi bahwa birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk dan regulasi perpajakan yang kurang kondusif merupakan faktor penghambat utama bisnis di Indonesia. Menurut Jetro (dikutip Kompas 2006), masalah utama dalam investasi di Indonesia adalah: (1) Upah yang makin mahal; (2) Sistem perpajakan yang sulit dan rumit; (3) Kebijakan yang tidak jelas dan tidak pasti; (4) Sulit dan rumitnya prosedur perdagangan; (5) Kondisi infrastruktur yang buruk; dan (6) Isu tenaga kerja/buruh (misalnya demonstrasi, dll)

Kurang terjaminnya keamanan, tidak adanya kepastian hukum, kondisi infrastruktur yang buruk dan sistem perburuhan yang makin kurang kondusif merupakan faktor penghambat kegiatan investasi, terutama investasi dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Selama pemerintahan Orde Baru, PMA merupakan faktor pendorong sangat krusial untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Selama periode pemerintahan tersebut, sumber perkembangan teknologi, perubahan struktural, diversifikasi produk dan pertumbuhan ekspor Indonesia sebagian besar adalah karena kehadiran PMA. Masuknya PMA didukung oleh iklim usaha yang kondusif, yaitu kondisi yang menyebabkan biaya dan risiko investasi serendah-rendahnya tetapi menghasilkan keuntungan jangka panjang yang setinggi-tingginya (Stern, 2002). Beberapa studi di India antara lain Aghion *et al.* (2003), Ahluwalia (2002), Rodrik and Subramanian (2004) dan World Bank (2005) dan di China antara lain Chen and Wang (2001), Qian (2003), Young (2000) dan World Bank (2005) menunjukkan bahwa perbaikan iklim investasi pada dekade 1980an dan 1990an yang menurunkan biaya dan risiko investasi secara signifikan telah dapat meningkatkan investasi swasta sekitar 200%. Di Indonesia, otonomi daerah dan lemahnya koordinasi antar institusi pemerintah juga merupakan kendala besar. Para pengusaha Australia misalnya, menganggap bahwa Indonesia tidak konsisten dalam menarik investor (Tempo Interaktif 9 Agustus 2006).

Kemudahan melakukan bisnis dapat dilihat dari jumlah prosedur, jumlah hari, biaya dan modal minimum. Di Indonesia, sebagai contoh adalah: jumlah prosedur mencapai 12, jumlah hari yang dibutuhkan adalah 151 hari, biaya yang dikeluarkan adalah 131 persen dari pendapatan per kapita, dan modal minimum yang harus dipenuhi adalah 126 persen dari pendapatan per kapita. Dibandingkan dengan 14 negara lainnya di Asia, Indonesia menempati urutan tertinggi pada jumlah prosedur, urutan kedua sesudah Laos pada jumlah hari, urutan kedua sesudah Kamboja pada biaya, dan urutan kelima pada modal minimum (World Bank, 2005). Jumlah hari untuk mendapatkan izin usaha berdasarkan prosedurnya adalah sebagai berikut (total 151 hari): (1) Izin lingkungan hidup 43 hari; (2) IMB 35 hari; (3) Izin lokasi 34 hari; (4) Izin prinsip 27 hari; (5) Izin gangguan 25 hari; dan (6) Izin keselamatan kerja 16 hari. Hal tersebut membuktikan bahwa kondisi di Indonesia paling sulit untuk investasi.

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 25 tentang Penanaman Modal, yang intinya memberikan insentif untuk investasi. Menurut UU tersebut pemerintah memberikan fasilitas dan insentif kepada perusahaan besar, utamanya modal asing, dan memberikan perangsang pajak berupa pajak pendapatan, pajak untuk modal, mesin atau peralatan, bebas pajak untuk bahan mentah, pajak pertambahan nilai, percepatan amortisasi dan pajak properti. Ijin penggunaan lahan (HGU) bagi investor asing sangat mudah dan masa HGU diperpanjang dari 70 tahun menjadi 95 tahun.

Negara-negara donor multilateral seperti World Bank, Asian Development Bank dan negara-negara maju seperti Jepang dan AS memberikan dukungan terhadap UU tersebut. Sebelum UU tersebut diberlakukan, pihak World Bank menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu memberikan paket kebijakan iklim investasi yang mencakup lima aspek, yaitu: kebijakan investasi, tarif, pajak, regulasi ketenagakerjaan, dan UKM. Bagian penting yang juga perlu dicatat dari UU tersebut adalah pembatalan Perda-Perda yang menghambat kegiatan bisnis,

dan telah diterapkannya pedoman pengembangan satu pintu (*one-stop shop*) oleh Pemda sesuai dengan paket reformasi iklim investasi.

Selama 10 tahun terakhir (1999-2008), investasi di Indonesia menurun secara signifikan. Namun pada tahun 2008, investasi PMA menjadi makin dominan yaitu merupakan 86,79 persen dari total investasi pada tahun 2008, yang mungkin merupakan dampak dari diterbitkannya UU Nomor 25 pada tahun 2007. Investasi tersebut meliputi berbagai sektor, yaitu: pertanian, perkebunan besar, kehutanan, pertambangan minyak, gas dan mineral. Pangsa PMA mencapai 85 persen untuk pertambangan migas, 100 persen untuk pertambangan mineral, 70 persen untuk pertambangan batubara dan lebih dari 50 persen untuk perkebunan besar. Luas lahan perkebunan BUMN adalah 3,3 juta ha dan swasta (domestik dan asing) 1,08 juta ha. Total luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan besar untuk semua penanaman modal di berbagai sektor tersebut adalah 175,6 juta ha yang merupakan 93 persen dari total luas lahan di Indonesia 192,26 juta ha. Sementara itu, luas lahan yang dikuasai petani hanya 11,8 juta ha.

Dari aspek pembiayaan pembangunan dapat dicatat bahwa jumlah hutang pemerintah Indonesia saat ini adalah Rp 1.600 triliun rupiah yang terdiri dari hutang dalam negeri dan hutang luar negeri dengan kewajiban membayar bunga. Jika hutang pemerintah ditambah dengan hutang swasta, maka total hutang pada tahun 2008 adalah Rp 2.500 triliun dengan kewajiban membayar bunga dan cicilan hutang luar negeri sebesar Rp 450 triliun yang terdiri dari Rp 350 triliun untuk swasta dan Rp 90 triliun untuk pemerintah. Jumlah tersebut merupakan 4 kali pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 sebesar Rp 119 triliun.

### **Peluang Ivestasi Pertanian di Masa Datang**

Di Indonesia, peluang investasi di sektor pertanian masih cukup besar. Beberapa indikatornya adalah sebagai berikut. *Pertama*, ketersediaan sumberdaya alam (lahan, air dan iklim) dan sumberdaya manusia yang masih besar. Investasi yang berbasis sumberdaya alam mempunyai pijakan kaki yang sangat kuat karena didukung oleh bahan baku yang tersedia secara lokal. Investasi demikian tidak akan mudah untuk berpindah ke negara lain karena bukan tipe investasi yang bersifat *footloose*. *Kedua*, permintaan domestik terhadap produk pertanian akan terus meningkat karena meningkatnya penduduk yang jumlahnya sudah besar dan makin tingginya pendapatan masyarakat. Permintaan dunia terhadap produksi pertanian Indonesia juga akan terus meningkat karena negara ini merupakan produsen utama beberapa komoditas pertanian yang dibutuhkan dunia, utamanya minyak sawit, karet, kakao, kopi, lada, pala, panili dan kayu manis. *Ketiga*, naiknya harga pangan dunia akhir-akhir ini memberikan peluang lebih besar kepada pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. *Keempat*, pemerintah Indonesia telah bertekad untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan dan peraturan.

## PENUTUP

Investasi merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur dan jasa publik sangat mempengaruhi minat dan hasil investasi yang dilakukan oleh masyarakat, baik perusahaan berskala besar (swasta nasional, swasta asing, BUMN) maupun usaha rakyat. Kebijakan investasi selama ini sudah diarahkan untuk meningkatkan investasi. Peluang investasi di bidang pertanian di Indonesia juga masih sangat besar. Namun masih diperlukan upaya lebih keras lagi untuk memecahkan berbagai permasalahan. Jika tidak, maka dikhawatirkan investor baru akan lebih memilih menginvestasikan dan investor lama akan mengalihkan investasi modalnya ke negara-negara lain yang lebih kondusif.

Kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan sekaligus mendorong investasi antara lain adalah sebagai berikut. *Pertama*, menciptakan stabilitas politik (mayoritas-minoritas), stabilitas sosial (kesenjangan sosial, 'sara') dan stabilitas ekonomi (harga-harga, tarif, nilai tukar mata uang, inflasi, suku bunga bank, dan lain-lain). *Kedua*, membangun pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, adanya konsistensi, kejelasan dan kepastian kebijakan pemerintah jangka panjang, serta birokrasi yang efisien dari segi waktu dan biaya pengurusan ijin investasi. *Ketiga*, menciptakan fungsi sektor pembiayaan yang efektif (sistem perbankan dan pasar modal) serta sistem ketenagakerjaan yang kondusif (sistem upah buruh yang adil tetapi tidak memberatkan perusahaan, kontrak kerja yang jelas, pelarangan demonstrasi buruh, dan lain-lain). Khususnya bagi usaha pertanian rakyat, persyaratan perbankan jangan sampai memberatkan petani untuk melakukan investasi yang sangat diperlukan, seperti alat dan mesin pertanian, saluran irigasi kuarter, pembukaan lahan/kebun, peternakan, dan lain-lain.

Keempat, menciptakan sistem perpajakan (PPN, PPn, dll) dan prosedur perdagangan ekspor-impor dan perdagangan domestik yang mudah dan sederhana. Kelima, mempermudah kepemilikan atau kontrak tanah perusahaan swasta, tetapi mayoritas lahan pertanian jangan sampai dikuasai perusahaan asing. Keenam, membatalkan semua Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat kegiatan investasi dan bisnis. Ketujuh, meningkatkan investasi pemerintah yang sangat diperlukan sebagai komplemen bagi investasi swasta dan rakyat di bidang pertanian, yaitu penelitian dan pengembangan pertanian untuk inovasi teknologi, prasarana jalan dan pelabuhan untuk pengangkutan input dan output, jaringan irigasi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi, jaringan listrik untuk energi, dan jaringan telekomunikasi untuk transaksi, informasi dan korespondensi dalam dunia bisnis. Ketujuh, melakukan pembinaan tenaga kerja agar menjadi lebih terampil, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi dan disertai dengan sistem *rewards and punishment* yang jelas muntuk mencapai produktivitas kerja yang makin tinggi.

Peran Kementerian Pertanian perlu difokuskan pada penyediaan barang dan jasa publik seperti pemeliharaan jaringan irigasi kuarter, penelitian dan pengembangan untuk inovasi teknologi pertanian di bidang bioteknologi, budidaya pertanian dan alsintan, pemberian subsidi input dan modal pertanian secara rasional, penyuluhan kepada para petani, serta pemberian ijin investasi dengan prosedur lebih mudah, cepat dan murah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S.A. 1955. "Capital Requirements for the Development of South and South-East Asia". Wolters. Groningen.
- Aghion, P., R. Burgess, S. Redding dan F. Zilibotti. 2003. "The Unequal Effects of Liberalization: Theory and Evidence from India". Research Paper. Center for Economic Policy Research. London.
- Ahluwalia, M. 2002. "Economic Reforms in India Since 1991: Has Gradualism Worked?" *Journal of Economic Perspective* 16(3): 67-88.
- Alcott, H., D. Lederman, and R. Lopez. 2006. "Political Institutions, Inequality, and Agricultural Growth: The Public Expenditure Connection". The World Bank Policy Research Working Paper 3902. Washington DC.
- Antholt, C.H. 1994. "Getting Ready for the Twenty-first Century: Technical Change and Institutional Modernization in Agriculture. World Bank Technical Paper 217. The World Bank. Washington DC.
- Beal, D.W. 1978. "Agricultural Education and Training in Developing Countries". *FAO Studies in Agricultural Economics and Statistics, 1952-1977*. FAO. Rome, pp. 282-291.
- BPN. 1957. "Model Pembangunan Ekonomi dalam Indonesia". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 10:483-526.
- BPS. 1997. "Estimation of Capital Stock and Investment Matrix in Indonesia". Background Paper. Capital Stock Conference. Jakarta, March, 1997.
- Chen, S., and Y. Wang. 2001. "China's Growth and Poverty Reduction: Trends between 1990 and 1999". World Bank Policy Research Working Paper Series 2651. World Bank. Washington DC, USA.
- Evenson, R.E. and J.W. McKinsey, Jr. 1991. "Research, Extension, Infrastructure, and Productivity Change in Indian Agriculture". In R.E. Evenson and C.E. Pray (eds). *Research and Productivity in Asian Agriculture*. Cornell University Press. Ithaca, USA, pp. 158-184.
- Fuglie, K.O. 2004. "Productivity Growth in Indonesian Agriculture, 1961-2000". *Bulletin of Indonesian Economic Study* 40(2):209-225.
- IDE. 1977. "Input-Output Table Indonesia, 1971". Institute of Developing Economics (2 volume). Tokyo.

- Jayne, T.S., Y. Khatri, C. Thirtle, and T. Reardon. 1994. "Determinants of Productivity Change Using a Profit Function: Smallholder Agriculture in Zimbabwe". *American Journal of Agricultural Economics* 76: 613-618.
- Kendrick, J.W. 1993. "How Much Does Capital Explain?" in A. Szirmai, B. Van Ark, and D. Pilat (eds): "Explaining Economic Growth: Essays in Honour of Angus Maddison". North Holland. Amsterdam.
- Kuznets, S. .1963. "Economic Growth and the Contribution of Agriculture: Notes on Measurement". *Proceedings of the Eleventh International Conference of Agricultural Economists: The Role of Agriculture in Economic Development*. Oxford University Press. London, pp.39-82.
- Kuznets, S. 1964. "Postwar Economic Growth: Four Lectures". Belknap. Cambridge, MA.
- Le Thanh, Ng.1988. "Sources of World Economic Growth". IDCJ Working Paper Series No. 41. International Development Center of Japan (IDCJ). Tokyo.
- Madison, A. 1991. "Dynamic Forces of Capitalist Development: A Long-Run Comparative View". Oxford University Press. Oxford.
- Mears, L.A. 1961. "Economic Development in Indonesia Through 1958". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 14(1/2):15-70.
- Nelson, R. 1964. "Aggregate Production Functions and Medium-Range Growth Projections". *American Economic Review*, 54 (September): 575-606.
- Nelson, R. 1981. "Research on Productivity Growth and Productivity Differences: Dead Ends and New Departures. *Journal of Economic Literature*, 19 (September): 1029-1064.
- Ohkawa, K. 1984. "Capital Output Ratios and the Residuals: Issues of Development Planning". IDCJ Working Paper Series No. 28. International Development Center of Japan (IDCJ). Tokyo.
- Pardey, P.G., J. Roseboom, and B.J. Craig. 1992. "A Yardstick for International Comparisons: An Application to National Agricultural Research Expenditures". *Economic Development and Cultural Change* 40: 333-349.
- Pray, C.E. and R.E. Evenson. 1991. "Research Effectiveness and the Support Base for National and International Agricultural Research and Extension Programs". In R.E. Evenson and C.E. Pray (eds). *Research and Productivity in Asian Agriculture*. USA Cornell University Press. Ithaca. USA.
- Qian, Y. 2003. "How Reform Worked in China" in D. Rodrik (ed): "In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth". Princeton University Press. Princeton. New Jersey.
- Rodrik, D., A. Subramanian, and F. Trebbi. 2002. "Institutions Rule: The Peimacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development". Harvard University Press. Cambridge, Masachusset.
- Stern, N.H. 2002. "A Strategy for Development". World Bank. Washington DC, USA.
- Tambunan, T. 2006. "Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi". Kamar Dagang Indonesia – Jetro. Jakarta.

- Van der Eng, P. 2009. "Capital Formation and Capital Stock in Indonesia, 1950-2008". *BIES* 45(3): 345-371.
- WEF. 2005. "The Global Competitiveness Report 2005-2006". World Economic Forum. Geneva.
- World Bank. 2005. "Iklim Investasi yang Lebih Baik Bagi Setiap Orang". Laporan Pembangunan Dunia 2005. The World Bank. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- World Bank. 2008. "World Development Report 2008 – Agriculture for Development". The World bank. Washington DC.
- World Bank. 2009. "Agriculture Public Spending and Growth in Indonesia". Policy Notes. Indonesia Agriculture Public Expenditure Review, September 2009. World Bank.
- Young, A. 2000. "Gold Into Base Metals: Productivity Growth in the People's Republic of China During the Reform Period". *Journal of Political Economy* 111(6).